

PENGORGANISASIAN KOMUNITAS OLEH INOVATOR PERTANIAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

The Community Organizing by Agricultural Innovator for Community Welfare

Eka Prayoga Kusumawarta¹⁾ dan Sofyan Sjaf¹⁾

¹⁾Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia,
Institut Pertanian Bogor, Darmaga Bogor 16680, Indonesia
Email: prayoga.zeus@gmail.com; sofyansjaf@gmail.com

ABSTRACT

Improving the welfare of rural communities is not only done by the government, but can be done by an agricultural innovator. One of the steps to improve the welfare of rural communities by agricultural innovator is through community organizing. The process involves the community since identifying and determining the priorities of a need. The purpose of this research is to identify organizing and analyze the relationship with community welfare. The research used quantitative support by qualitative data analysis. The result of the research that the organizing of agricultural innovator is at the level of development of local communities with the level of community welfare classified as moderate. So these finding concluded that the level of organizing an agricultural innovator is related to the level of community welfare. The sustainability of organizing an agricultural innovator is recommended for empowerment activities in the form of social planning and social action.

Keyword: organizing, community welfare, empowerment

ABSTRAK

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan bukan hanya dilakukan pemerintah, melainkan dapat dilakukan oleh seorang inovator pertanian. Salah satu langkah seorang inovator pertanian meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan melalui pengorganisasian masyarakat. Proses melibatkan masyarakat sejak mengidentifikasi dan menentukan prioritas dari sebuah kebutuhan. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi pengorganisasian dan menganalisis hubungan pengorganisasian seorang inovator pertanian dengan kesejahteraan masyarakat. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang didukung oleh analisis data kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pengorganisasian seorang inovator pertanian menunjukkan level pengembangan komunitas lokal dengan tingkat kesejahteraan masyarakat tergolong sedang. Jadi temuan ini disimpulkan level pengorganisasian seorang inovator pertanian berhubungan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan dari pengorganisasian seorang inovator pertanian disarankan untuk melakukan kegiatan pemberdayaan dalam bentuk perencanaan sosial dan aksi sosial.

Kata Kunci: pengorganisasian, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama di dalam pembangunan. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dapat menciptakan struktur masyarakat atau negara yang seimbang dan teratur dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Setiap implementasi kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang ingin dicapai. Menurut BPS (2015), tingkat kesejahteraan

masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah. Kondisi ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk miskin yang masih tinggi, yaitu sebanyak 28,55 juta atau 14 persen. Selain itu, sebanyak 63 persen penduduk yang tergolong miskin berada di pedesaan.

Jumlah pedesaan di Indonesia setiap tahun semakin meningkat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa jumlah pedesaan di Indonesia sebanyak 74.093 desa. Peraturan Menteri Dalam

Negeri berikutnya yaitu Permendagri No. 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan juga menyatakan bahwa jumlah desa di Indonesia sebanyak 74.754 desa. Dengan demikian jumlah desa di Indonesia telah mengalami peningkatan sebanyak 661 desa.

Desa¹ diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Tujuan kewenangan desa adalah agar desa dapat menentukan rencana untuk pembangunan desa. Pendekatan pembangunan desa dilakukan berdasarkan dua konsep yaitu desa membangun dan membangun desa. Fokus desa membangun bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif. Perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota menjadi acuan dalam desa membangun. Desa membangun mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumberdaya alam serta lingkungan secara berkelanjutan. Konsep desa membangun antara lain peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya alam lokal yang tersedia, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, peningkatan kualitas keterlibatan dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. Sedangkan konsep membangun desa adalah peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan tata ruang Kabupaten atau Kota sebagai acuan. Konsep membangun desa mencakup penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan antar desa secara terpadu, penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan ekonomi serta pembangunan infrastruktur kawasan (Kolopaking *et.al* 2016).

Upaya untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu dengan memperhatikan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa. Sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa merupakan faktor yang paling penting dalam upaya

mewujudkan tujuan pembangunan desa. Salah satu upaya yang dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di desa yaitu melalui pengorganisasian. Landasan filosofis dari kebutuhan untuk melakukan pengorganisasian adalah meningkatkan kapasitas masyarakat. Artinya, masyarakat sendiri yang seharusnya berdaya dan menjadi penentu dalam melakukan perubahan yang diharapkan serta dapat mendorong kesadaran dan pemahaman kritis masyarakat tentang berbagai aspek kehidupan. Pengorganisasian juga dilakukan untuk mendorong kearifan budaya sebagai alat dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih demokratis dalam pemecahan masalah.

Nasdian (2014) mengatakan bahwa terdapat dua kategori tujuan utama yang terkait dengan pengorganisasian masyarakat. Pertama, cenderung mengacu pada tugas (*task*). Tujuan yang berorientasi pada tugas menekankan pada penyelesaian tugas-tugas ataupun pemecahan masalah yang mengganggu fungsi sistem sosial. Kedua, cenderung mengacu pada proses. Tujuan berorientasi pada proses adalah perluasan dan pemeliharaan sistem yang bertujuan untuk memapankan relasi kerja sama. Pengorganisasian sebagai strategi pendukung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan pembangunan desa memiliki peranan yang penting. Peran pengorganisasian diperlukan dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan benar-benar merupakan kebutuhan dari masyarakat. Pengorganisasian akan berjalan jika komitmen masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan tersebut ada (Bezboruah 2013).

Pengorganisasian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan pembangunan desa biasanya dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai pimpinan negara mempunyai tugas utama untuk memajukan kesejahteraan. Suhardin (2007) dalam penelitiannya mengatakan bahwa tujuan mendirikan negara adalah agar tercipta kesejahteraan masyarakat yang oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara merumuskannya dalam peraturan yang responsif, aspiratif dan progresif sesuai dengan kepentingan masyarakat. Seiring dengan berkembangnya masyarakat desa membuat seorang inovator

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan pengertian desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan

pertanian yang ada di desa juga berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Seorang inovator pertanian membuktikan bahwa pengorganisasian dalam upaya mencapai tujuan pembangunan desa bukan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah.

Berkaitan dengan kajian konsep tersebut, menjadi menarik untuk mengkaitkannya dengan realitas di lapangan. Salah satu unit wilayah yang relevan untuk ditinjau adalah Desa Sukamantri. Desa Sukamantri secara administrasi masuk ke dalam wilayah Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor dengan luas wilayah 639 Ha yang terdiri dari 14 RW dan 67 RT. Desa ini terkenal dengan kegiatan pengorganisasian yang dilakukan oleh inovator pertanian yang bernama Bapak S. Awalnya, Bapak S memperkenalkan formula hormon pertanian yang membuat hara tanah tidak rusak, tanaman menjadi subur, waktu panen bisa dipercepat, dan bulir padi menjadi lebih berisi. Hormon tersebut selanjutnya dikenal sebagai hormon tanaman unggul atau yang disingkat hantu. Bapak S sebagai penemu akhirnya biasa disebut dengan Jimmy Hantu (JH). Pengorganisasian yang dilakukan JH melalui kegiatan pemberdayaan. Salah satu kegiatan tersebut misalnya membentuk kader-kader pertanian secara mandiri agar mereka mampu menyelesaikan masalah pertanian. Selain itu, terdapat kegiatan pengelolaan bank sampah yang juga melibatkan masyarakat sekitar. Tujuan pengorganisasian yang dilakukan JH adalah untuk memaksimalkan kapasitas masyarakat yang minim pengetahuan dalam mencapai kesejahteraan melalui pemanfaatan sumberdaya lokal. Berdasarkan hal tersebut, maka tulisan ini memiliki pertanyaan: (1) sejauhmana level pengorganisasian yang dilakukan seorang inovator pertanian di Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari?; (2) sejauhmana tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari?; (3) seberapa besar hubungan level pengorganisasian yang dilakukan seorang inovator pertanian dengan kesejahteraan masyarakat?. Tulisan ini juga memiliki tujuan: (1) mengidentifikasi level pengorganisasian yang dilakukan seorang inovator pertanian di Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari; (2) mengidentifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari; (3) menganalisis hubungan level pengorganisasian yang dilakukan seorang inovator pertanian dengan kesejahteraan masyarakat.

PENDEKATAN TEORITIS

Inovator Pertanian

Orang yang memperkenalkan ide, gagasan, atau teknologi baru (inovasi) disebut sebagai inovator. Menurut Rogers (1983), membagi petani ke dalam lima golongan berdasarkan kecepatan mengadopsi inovasi, yaitu inovator, *early adopter*, *early majority*, *late majority*, dan *laggard*. Inovator mempunyai ciri-ciri aktif mencari informasi, berani mengambil risiko, berpendidikan cukup baik, relatif berusia muda, mobilitas sosial cukup tinggi, mempunyai pendapatan di atas rata-rata, sebagai perintis pemula dalam adopsi inovasi. Selanjutnya, *early adopter* mempunyai ciri-ciri yaitu merupakan pemimpin pendapat (*opinion leader*), berani mengambil risiko, berpendidikan cukup baik, relatif berusia muda, mobilitas sosial cukup tinggi, memiliki pendapatan di atas rata-rata, suka mencoba/mempraktekan inovasi yang baru dikenalkan, merupakan golongan pembaharuan. *Early majority*, mempunyai ciri-ciri mempunyai rasa kehati-hatian dalam mengambil keputusan, mobilitas sosial kurang, berpendidikan rata-rata, usia relatif muda, akan mengadopsi setelah melihat bukti dari orang lain. *Late majority*, mempunyai ciri-ciri bersikap skeptis terhadap inovasi, usia relatif lebih tua, status sosial relatif rendah, mobilitas sosial rendah, kalau mengadopsi lebih disebabkan karena perasaan malu/segan, bukan karena penilaian yang positif terhadap inovasi. *Laggard*, mempunyai ciri-ciri berorientasi lokal, berfikiran dogmatis, berorientasi pada masa lalu, dibutuhkan waktu lama untuk meyakinkan mereka agar mengadopsi inovasi, atau bahkan akan menolak selamanya.

Pengorganisasian

Pengorganisasian masyarakat merupakan sebuah proses pembangunan yang dapat dimobilisasi (Andini 2013). Hal ini meliputi membangun jaringan orang-orang, mengidentifikasi cita-cita bersama, dan siapa yang dapat terlibat dalam tindakan atau aksi sosial untuk mencapai cita-cita bersama tersebut. Andini (2013) juga menambahkan bahwa pengorganisasian masyarakat mengacu kepada keseluruhan proses pengorganisasian hubungan, pengidentifikasian isu, mobilisasi orang untuk isu tersebut, serta mengurus dan mempertahankan organisasi. Pengorganisasian juga merupakan suatu proses membangun kekuatan yang melibatkan orang-orang dalam mendefinisikan persoalan yang

ingin diselesaikan. Proses pengorganisasian dapat meningkatkan modal sosial baik bagi individual dengan cara meningkatkan dan memperkuat kepentingan bersama. Mukhotib (2012) mendeskripsikan tahapan atau langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam pengorganisasian yaitu (1) integrasi; (2) riset aksi; (3) memastikan persoalan yang akan ditangani; (4) membangun pemahaman bersama; (5) menggalang pertemuan-pertemuan; (6) menguji tindakan; (7) saatnya bertindak; (8) evaluasi; (9) refleksi; (10) organisasi yang kuat.

Menurut Rothman dan Tropman (1987), terdapat tiga level pengorganisasian dalam kerangka pengembangan masyarakat sebagai berikut:

1. Pengembangan Komunitas Lokal
Kategori tujuannya lebih menekankan pada proses, di mana masyarakat atau komunitas diintegrasikan dan dikembangkan kapasitasnya dalam upaya memecahkan masalah secara kooperatif berdasarkan kemauan dan kemampuan menolong diri sendiri. Sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis. Komunitas lokal seringkali tertutupi oleh masyarakat yang lebih luas (*larger society*), dan menyebabkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan.
2. Perencanaan Sosial
Perencanaan sosial kategori tujuan lebih ditekankan pada *task goal* (tujuan yang berorientasi pada penyelesaian tugas). Perencanaan sosial biasanya berhubungan dengan masalah-masalah sosial yang kongkrit dan nama-nama bagian yang juga mencirikan hal ini.
3. Aksi Sosial
Pendekatan aksi sosial mengarah pada *task goal* dan *process goal*. Beberapa organisasi aksi sosial memberi penekanan pada upaya terbentuknya peraturan yang baru atau mengubah praktek-praktek tertentu. Biasanya tujuan ini mengakibatkan adanya modifikasi kebijakan organisasi-organisasi formal.

Menurut Bezboruah (2013), pengorganisasian masyarakat adalah proses komprehensif untuk mengelola perubahan dalam sebuah masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pembahasan tentang visi bersama, isu yang menonjol dari perencanaan dan implementasi strategi. Terdapat peran penting masyarakat dan organisasi akar rumput agar tujuan mengorganisir masyarakat bisa tercapai. Bezboruah (2013) dalam penelitiannya menguatkan level pengorganisasian yang

sebelumnya disebutkan oleh Rothman dan Tropman (1987) melalui perbedaan aspek yang dilihat dari tujuan pengorganisasian, kemampuan masyarakat membangun jaringan, peranan masyarakat, dan peranan pekerja sosial.

Kesejahteraan Masyarakat

BPS (2015) menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek yang datanya tersedia dan diukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, serta sosial ekonomi lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kependudukan menurut BPS (2015) sebagai salah satu aspek dalam melihat kesejahteraan masyarakat adalah meningkatnya jumlah penduduk yang akan berdampak pada munculnya permasalahan dalam hal kependudukan. Aspek berikutnya yang menurut BPS (2015) menjadi penting yaitu pendidikan. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumberdaya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Berikutnya adalah aspek ketenagakerjaan. Menurut BPS (2015), ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah, dimana masalah ketenagakerjaan ini merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Salah satu indikator untuk melihat ketenagakerjaan adalah pendapatan.

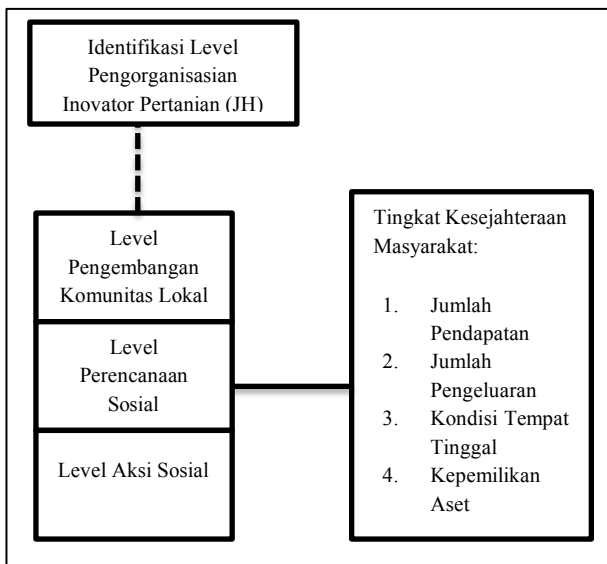
Aspek selanjutnya yaitu taraf dan pola konsumsi. Menurut BPS (2015), pola konsumsi penduduk juga merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat. Data pengeluaran dapat mengungkapkan pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan *non* makanan. Sedangkan aspek perumahan dan lingkungan menurut BPS (2015) yaitu salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan masyarakat. Rumah

selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang, yang berhubungan positif dengan kualitas atau kondisi rumah.

Kemiskinan menjadi aspek berikutnya dalam melihat kesejahteraan masyarakat. Menurut BPS (2015), Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Aspek terakhir untuk melihat kesejahteraan masyarakat yaitu sosial ekonomi lainnya. Menurut BPS (2015), tingkat kebutuhan mulai mengalami pergeseran, dari kebutuhan sekunder atau tersier menjadi kebutuhan primer, seperti berlibur atau berwisata, eksistensi di tengah masyarakat melalui kepemilikan aset, dan mengakses teknologi informasi dan komunikasi.

Kerangka Pemikiran

Pengorganisasian yang dilakukan inovator pertanian (JH) diidentifikasi untuk mendapatkan level pengorganisasian yang cenderung sesuai diantara ketiga level yaitu pengembangan komunitas lokal, perencanaan sosial, dan aksi sosial. Ketiga level pengorganisasian ini diidentifikasi menggunakan teori Rothman dan Tropman (1987) yang diperkuat oleh Bezboruah (2013).



Keterangan:

- : Hubungan
- : Kuantitatif
- : Fokus Penelitian

Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Tingkat kesejahteraan masyarakat dilihat berdasarkan BPS (2015) yang menggunakan variabel jumlah pendapatan, jumlah pengeluaran, kondisi tempat tinggal dan kepemilikan aset. Selanjutnya dilihat hubungan antara level pengorganisasian dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sehingga diketahui seberapa besar dan arah hubungan antara level pengorganisasian yang cenderung sesuai dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Adapun usulan kerangka pemikiran baru disajikan pada Gambar 1.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode survei dan dikuatkan analisis data kualitatif. Pendekatan kuantitatif melalui metode survei yaitu informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini juga bersifat eksplanatori karena menjelaskan hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesa (Singarimbun dan Effendi 1989).

Penelitian mengenai hubungan pengorganisasian seorang inovator pertanian dengan kesejahteraan masyarakat ini dilakukan di Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemilihan dilakukan secara *purposive* (sengaja) dengan pertimbangan diantaranya, (1) terdapat seorang inovator pertanian yang terkenal memiliki kegiatan pengorganisasian di Desa Sukamantri yaitu JH; dan (2) terdapat kegiatan pengorganisasian yang dilakukan seorang inovator pertanian melalui pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamantri. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu lima bulan dari September 2017 hingga Januari 2018.

Desa Sukamantri mempunyai 14 RW, melihat cakupan wilayah yang luas tersebut maka peneliti membatasi penelitian ini di 6 RW yaitu RW 03, 05, 06, 07, 08 dan 13. Pertimbangan peneliti dalam pemilihan RW yaitu karena RW 03, 05, dan 08 berdekatan dengan tempat JH melakukan kegiatan pemberdayaan, sedangkan RW 06, 07 dan 13 merupakan RW yang berlokasi jauh dari tempat JH melakukan kegiatan pemberdayaan. Populasi penelitian ini adalah seluruh rumah tangga di RW 03, 05, 06, 07, 08 dan 13 Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari yang berjumlah 1.940 kepala keluarga. Kerangka sampling penelitian ini yaitu rumah tangga di RW 03, 05, 06, 07, 08, dan 13 Desa Sukamantri,

Kecamatan Tamansari yang mengikuti kegiatan pemberdayaan JH sebanyak 639 kepala keluarga. Unit analisis penelitian ini adalah rumah tangga. Unit rumah tangga yang dimaksud adalah kepala keluarga atau anggota keluarga yang bisa mewakili keluarga. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu *simple random sampling* dengan total responden sebanyak 30. Teknik ini dipilih karena kerangka sampling bersifat *homogen* yaitu rumah tangga di RW 03, 05, 06, 07, 08, dan 13 Desa Sukamatri Kecamatan Tamansari dengan kriteria rumah tangga yang mengikuti kegiatan pemberdayaan JH. Pemilihan terhadap informan dilakukan secara *purposive* (sengaja) dengan jumlah yang tidak ditentukan. Penetapan informan ini dilakukan dengan menggunakan teknik bola salju (*snowball*) kepada Bapak S, perangkat desa dan tokoh masyarakat desa yang dianggap mengetahui tentang pengorganisasian seorang inovator pertanian dan kesejahteraan masyarakat Desa Sukamantri.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan langsung di lapangan dengan cara survei, observasi dan menggunakan instrumen kuesioner kepada responden. Sementara itu, Data Sekunder diperoleh melalui studi literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti perangkat desa dan tokoh masyarakat yang ada di desa, serta hasil penelitian sebelumnya yang dijadikan unit analisis.

Data kuantitatif diolah menggunakan aplikasi *Microsoft Excel 2010*. Data dianalisis dengan menggunakan tabel frekuensi, tabulasi silang, grafik atau diagram. Kemudian IBM SPSS *Statistics 16 for Windows* digunakan untuk uji statistik yang menggunakan uji korelasi *rank spearman* untuk melihat hubungan level pengorganisasian dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Menurut Miles dan Huberman (1992), pengolahan dan analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengorganisasian Inovator Pertanian

Pengertian inovator pertanian menurut Rogers (1983) adalah seseorang yang menemukan ide/gagasan/teknologi baru dan menyebar luaskan kepada masyarakat untuk diadopsi yang selanjutnya disebut sebagai penyuluh. Hal tersebut berbeda

dengan pengertian inovator pertanian yang dimaksud dalam tulisan ini. Inovator pertanian merupakan seorang individu yang menemukan teknologi baru dalam bidang pertanian dan dimanfaatkan untuk mendirikan sebuah usaha. JH sebagai inovator pertanian yang dimaksud telah menemukan formula hormon tanaman unggul yang kemudian mendirikan usaha bernama Mutiara Keraton Jimmy&Co.

Adapun visi JH dalam mendirikan usaha Mutiara Keraton Jimmy&Co. yaitu menjadi pengembang teknologi pertanian di Indonesia guna mendukung pertanian nasional yang tangguh. Sementara itu, misi JH adalah menghasilkan nutrisi atau suplemen makanan bagi tumbuhan yang berfungsi sebagai pemicu pertumbuhan tanaman secara maksimal, meningkatkan hasil pertanian dari sisi kualitas dan kuantitas, menyediakan layanan pelatihan untuk menjadi petani profesional, memajukan kesejahteraan petani di Indonesia, menciptakan teknologi pertanian modern melalui teknologi Jimmy Hantu-150, dan mewujudkan “petani berdasi” dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Tentunya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, JH bekerja sama dengan beberapa instansi, seperti saat ini JH bekerja sama dengan PSP3 IPB dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani.

Usaha Mutiara Keraton Jimmy&Co. telah memproduksi beberapa produk hormon pertanian yang disebut teknologi Jimmy Hantu-150. Teknologi tersebut terdiri dari produk NPK Hantu, ZPT Ratu Biogen, dan POC Hantu Jantan. JH juga sedang mengembangkan produk herbal untuk kesehatan dan kecantikan yaitu sirup detoksifikasi Langitan dan sabun kecantikan, namun produk ini masih belum mendapatkan izin BPOM untuk dipasarkan lebih luas. Meskipun belum semua produk dapat dipasarkan, JH memiliki distributor yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memasarkan produk-produk Jimmy Hantu-150. Produk tersebut dijual mulai dari harga Rp. 65.000 hingga 229.000 per botol.

Fase kehidupan JH tidak langsung bisa dikatakan sebagai orang sukses. Demi mencapai kesuksesan tersebut, JH memulainya dari bawah. Sejak kecil JH menjadi anak yatim. Ayah JH meninggal pada saat JH masih kecil, sehingga JH tidak pernah tahu persis wajah ayahnya. Oleh karena itu, JH sudah terbiasa hidup susah dari kecil. Waktu SD, JH sudah ikut bekerja dengan mengurus padi dan tanaman lainnya di sawah. Kemudian saat SMP, JH juga bekerja sampingan di tempat penggilingan padi. Lanjut di

SMA, JH juga bekerja mencari sampingan dengan berjualan kecap dan koran. Pada saat kuliah JH juga sempat menjadi redaktur Kompas selama lima tahun. Sampai akhirnya, JH memutuskan untuk merantau ke Bogor dan memilih tinggal di Desa Sukamantri. Rumah yang dihuni pada saat itu masih berstatus kontrak dan JH sering berpindah rumah. JH mulai meracik formula hormon tanaman unggul juga di rumah tersebut dengan berbekal pengetahuan kimia yang diakui lebih bagus dibanding bidang yang dia pelajari selama kuliah. Di desa Sukamantri, JH tidak diterima oleh masyarakat begitu saja, sehingga JH merupakan seorang pendatang. Kondisi ini banyak menimbulkan penilaian negatif di masyarakat. Misalnya ketika pertama kali mendirikan masjid, JH mendapatkan protes karena persoalan adzan di masjid tersebut yang mendahului masjid utama di Desa Sukamantri.

Latar belakang kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh JH yaitu manusia memiliki keutamaan dan pembeda dari makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Keutamaan tersebut yang akhirnya memilih manusia untuk menjadi *khalifah* (pemimpin) di bumi ini. Keutamaan tersebut adalah akal. Kegunaan akal adalah untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Hal ini juga menjadi renungan oleh JH untuk menggunakan akal yang telah diberikan oleh Tuhan secara benar. JH mengatakan bahwa kehidupan di dunia hanya sementara dan ketika manusia tidak bisa memberikan manfaat untuk dunia ini, lebih baik memilih mati. Ibaratnya "*apa manfaat kamu untuk dia?*". Ketika manusia berusaha untuk memberikan manfaat maka itu akan bernilai kebaikan yang akan menolong di akhirat nanti. Menurut JH, kebaikan bukan hanya sebuah nilai yang bisa didapat begitu saja, tapi kebaikan juga memerlukan aksi wujud nyata dan memberikan manfaat pada orang lain. Contoh saja Negara Indonesia ini. Negara ini merupakan induk masalah dari semua masalah. Ketika semua orang meminta hak kepada negara ini dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, maka negara ini akan hancur. Karena tidak mampu memenuhi semua hak penduduk. Pemikiran ini yang melatar belakangi JH untuk membantu masyarakat memenuhi haknya bukan dengan cara meminta, tetapi dengan cara berusaha secara mandiri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai yang dikembangkan JH dalam kegiatan pemberdayaan adalah memberikan kebermanfaatn bagi orang lain.

Pemberdayaan menurut JH merupakan membangun bersama dan bagi orang yang diberdayakan adalah sebuah keberuntungan. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh JH meliputi di bidang ekonomi, pendidikan, dan religi. Adapun kegiatan tersebut adalah kader pertanian, pengelolaan bank sampah, mendirikan lembaga pendidikan yang berbasis pertanian, pengajian, perbaikan jalan dan forum RW. Tulisan ini membatasi pengorganisasian JH melalui kegiatan pemberdayaan pada pembentukan kader-kader pertanian dan pengelolaan bank sampah. Kegiatan pembentukan kader-kader pertanian ini merupakan hasil pengamatan JH yang menemukan fakta bahwa orang-orang malu mengaku bekerja sebagai petani atau anak petani. Pekerjaan sebagai petani identik dengan golongan bawah, miskin, serta kotor. Selain menciptakan kader-kader pertanian, kegiatan pemberdayaan JH lainnya di Desa Sukamantri yaitu pengelolaan bank sampah. Ide untuk mendirikan bank sampah berawal dari keperihatinan JH terhadap masyarakat Desa Sukamantri yang membuang sampah begitu saja, padahal di dalam sampah tersebut masih terdapat barang-barang yang bisa dimanfaatkan, seperti sampah organik yang dimanfaatkan untuk pupuk.

Tahapan-tahapan pengorganisasian yang dilakukan oleh JH dianalisis dengan menggunakan teori menurut Mukhotib (2012). Tahapan pengorganisasian JH hanya sampai pada tahapan evaluasi. Pengorganisasian dimulai dengan integrasi. Integrasi yang dimaksud dalam pengorganisasian JH adalah JH sebagai pihak inisator yang dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat untuk bekerja bersama-sama. Setelah dapat dipercaya oleh masyarakat, JH melakukan riset aksi dengan pengamatan (*observasi*) di lingkungan sekitar untuk mencari persoalan apa saja yang ada di masyarakat. JH menemukan beberapa persoalan yang ada di masyarakat Desa Sukamantri mulai dari kurang minatnya pertanian, kebersihan lingkungan, hingga rendahnya tingkat pendidikan. Selanjutnya JH memastikan persoalan yang akan ditangani dengan membuat ide untuk memberdayakan masyarakat. Membangun pemahaman bersama merupakan langkah selanjutnya untuk memperkenalkan kegiatan pemberdayaan yang dapat diikuti oleh masyarakat yaitu pembentukan kader pertanian dan pengelolaan bank sampah. Membangun pemahaman bersama tentunya akan lebih mudah apabila dengan mengadakan pertemuan dan berdiskusi langsung bersama masyarakat. JH memilih dengan mengadakan kegiatan pengajian setiap minggu.

Kegiatan pengajian tersebut juga dimanfaatkan JH untuk memperkenalkan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat dan berdiskusi tentang kegiatan tersebut.

Tahapan selanjutnya yaitu menguji tindakan yaitu JH merumuskan kembali kegiatan pemberdayaan dengan hasil diskusi yang dilakukan bersama masyarakat di kegiatan pengajian. Setelah dirasakan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka saatnya JH untuk bertindak melaksanakan kegiatan pemberdayaan tersebut. Awal kegiatan pemberdayaan berlangsung, JH masih sering mengadakan evaluasi bersama masyarakat terkait pembentukan kader pertanian dan pengelolaan bank sampah. Evaluasi ini dilakukan minimal satu bulan sekali. Namun, seiring dengan kesibukan JH yang semakin padat, kegiatan evaluasi juga jarang dilakukan. Kegiatan evaluasi yang jarang dilakukan menyebabkan tidak adanya refleksi tentang pentingnya pengorganisasian JH yang dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan, sehingga hal ini belum membuat kegiatan pemberdayaan JH menjadi organisasi yang kuat.

Tabel 1 Jumlah dan persentase level pengorganisasian JH berdasarkan level pengembangan komunitas lokal, perencanaan sosial, dan aksi sosial di Desa Sukamantri, 2017

Level Pengorganisasian	Kategori	Jumlah (n)	Persentase (%)
Level Pengembangan Komunitas Lokal	Rendah	6	20
	Sedang	6	20
	Tinggi	18	60
Total		30	100
Level Perencanaan Sosial	Rendah	4	13,3
	Sedang	24	80
	Tinggi	2	6,7
Total		30	100
Level Aksi Sosial	Rendah	21	70
	Sedang	8	26,7
	Tinggi	1	3,3
Total		30	100

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 24 responden atau 80% menyatakan bahwa level pengorganisasian JH tergolong sedang. Sementara itu, jika dilihat level pengorganisasian menurut Rothman dan Tropman (1987) yaitu pengembangan komunitas lokal, perencanaan sosial, dan aksi sosial yang menggunakan aspek pembeda menurut Bezboruah (2013) menunjukkan bahwa pengorganisasian yang dilakukan oleh JH berada di level pengembangan komunitas lokal. Hasil data kuantitatif menunjukkan bahwa sebanyak 60% responden memilih tinggi untuk level pengembangan

komunitas lokal pada pengorganisasian JH. Sebanyak 80% responden memilih sedang untuk level perencanaan sosial, dan sebanyak 70% responden memilih rendah untuk level aksi sosial.

Bezboruah (2013) menentukan aspek level pengembangan komunitas lokal sebagai berikut, (1) tujuan pengembangan komunitas lokal untuk meningkatkan kemandirian masyarakat; (2) kemampuan masyarakat dalam membangun jaringan rendah; (3) peran masyarakat sebagai partisipan dalam kegiatan; (4) peran pekerja sosial sebagai pembimbing atau koordinator dalam kegiatan. Diantara keempat aspek tersebut yang cenderung sesuai dengan pengorganisasian yang dilakukan oleh JH adalah tujuan pengembangan komunitas lokal untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam membangun jaringan yang rendah. Hal ini dibuktikan dengan tujuan pengorganisasian yang dilakukan oleh JH untuk memaksimalkan kapasitas masyarakat yang minim pengetahuan dalam mencapai kesejahteraan melalui pemanfaatan sumberdaya lokal secara mandiri. Masyarakat di Desa Sukamantri memiliki kemampuan yang rendah dalam membangun jaringan, karena pola pikir masyarakat yang masih menganggap bahwa pendatang atau orang baru merupakan ancaman yang merusak. Pola pikir ini muncul karena masyarakat Desa Sukamantri yang cenderung homogen dari segi etnis yaitu sunda. Kondisi ini juga disebabkan sumber daya manusia (SDM) masyarakat di Desa Sukamantri yang masih rendah. Terlihat dari tingkat pendidikan masyarakat di Desa Sukamantri yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD). Berdasarkan data profil Desa Sukamantri (2017) menunjukkan bahwa masyarakat yang tamat SD sebanyak 3.986 jiwa. Kondisi ini juga menjadi alasan JH untuk memberdayakan masyarakat di Desa Sukamantri.

Kesejahteraan Masyarakat Desa Sukamantri

Tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Sukamantri tergolong sedang. Sebanyak 83,3% atau 25 responden menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat di Desa Sukamantri tergolong sedang. Selanjutnya 10% atau setara dengan 3 responden menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat di Desa Sukamantri tergolong tinggi. Sisanya sebanyak 6,7% atau 2 responden menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat tergolong tinggi.

Tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Sukamantri tergolong sedang juga didukung dengan data rumah tangga sejahtera yang dimiliki oleh desa.

Data tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga yang berada di kategori keluarga sejahtera I, II, dan III (sedang) sebanyak 12.422 KK. Selanjutnya rumah tangga yang berada di kategori keluarga sejahtera III plus (tinggi) sebanyak 258 KK, sisanya yaitu rumah tangga yang berada di kategori keluarga sejahtera I (rendah) berjumlah 161 KK. Berdasarkan kategori jenis mata pencaharian masyarakat yang memiliki kesejahteraan tergolong rendah adalah buruh tani, sedangkan jenis mata pencaharian sebagai PNS dan karyawan swasta cenderung memiliki kesejahteraan tergolong tinggi.

Tabel 2 Jumlah dan persentase berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Sukamantri, 2017

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah (n)	Persentase (%)
Rendah	2	6,7
Sedang	25	83,3
Tinggi	3	10
Total	30	100

Tulisan ini menggunakan variabel BPS (2015) untuk melihat kesejahteraan masyarakat di Desa Sukamantri. Adapun variabel yang digunakan yaitu pendapatan rumah tangga, pengeluaran rumah tangga, kondisi tempat tinggal, dan kepemilikan aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat di Desa Sukamantri berada di golongan sedang. Sebesar 43,3% atau setara 13 responden memiliki pendapatan pada golongan sedang. Rentang pendapatan di golongan tersebut yaitu diantara Rp. 1.500.000 – 5.000.000. Mata pencaharian masyarakat yang dominan yaitu di luar bidang pertanian, seperti wiraswasta/pedagang. Data profil desa juga menunjukkan bahwa sebesar 40,7% atau setara dengan 5.226 masyarakat di Desa Sukamantri memilih jenis mata pencaharian sebagai wiraswasta/pedagang. Masyarakat di Desa Sukamantri yang memiliki mata pencaharian di bidang pertanian cenderung sebagai buruh tani. Kondisi ini disebabkan lahan pertanian di Desa Sukamantri yang terus berkurang setiap tahunnya. Berkurangnya lahan pertanian ini dikarenakan pembangunan permukiman atau perumahan. Salah satunya adalah pembangunan perumahan yang terbentuk di RW baru di Desa Sukamantri yaitu RW 15. Selain karena faktor lahan pertanian yang sudah semakin berkurang, pendapatan masyarakat yang memiliki mata pencaharian di bidang pertanian juga tergolong lebih rendah dibandingkan masyarakat yang memiliki mata pencaharian *non* pertanian. Rata-rata masyarakat yang memiliki mata pencaharian di bidang pertanian memiliki

pendapatan sekitar Rp. 900.000 – Rp. 1.500.000 per bulan. Berbeda dengan masyarakat yang memiliki mata pencaharian di bidang *non* pertanian yang menghasilkan pendapatan lebih dari 1.500.000 per bulan.

Tabel 3 Jumlah dan persentase variabel kesejahteraan masyarakat berdasarkan tingkat pendapatan rumah tangga, tingkat pengeluaran rumah tangga, kondisi tempat tinggal, dan kepemilikan aset masyarakat di Desa Sukamantri, 2017

Variabel Kesejahteraan Masyarakat	Kategori	Jumlah (n)	Persentase (%)
Tingkat Pendapatan Rumah Tangga	Rendah	8	26,7
	Sedang	13	43,3
	Tinggi	9	30
Total		30	100
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga	Rendah	12	40
	Sedang	3	10
	Tinggi	15	50
Total		30	100
Kondisi Tempat Tinggal	Tidak Permanen	2	6,7
	Semi Permanen	12	40
	Permanen	16	53,3
Total		30	100
Kepemilikan Aset	Rendah	4	13,3
	Sedang	24	80
	Tinggi	2	6,7
Total		30	100

Sementara itu, tingkat pengeluaran rumah tangga di Desa Sukamantri tergolong tinggi. Sebesar 50% atau 15 responden mengatakan bahwa tingkat pengeluaran rumah tangga tinggi. Rentang pengeluaran lebih dari Rp. 2.500.000 per bulan. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menjadi pengeluaran konsumsi dan *non* konsumsi. Pengeluaran konsumsi rumah tangga di Desa Sukamantri cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran *non* konsumsi. Kecenderungan tersebut disebabkan karena pengeluaran konsumsi untuk membeli rokok. Responden dalam penelitian ini mayoritas merupakan perokok aktif atau memiliki suami perokok. Rata-rata responden yang perokok atau memiliki suami perokok mengeluarkan biaya untuk membeli rokok kurang lebih Rp. 15.000 – 20.000 per bungkus. Rokok yang sudah dibeli tersebut bisa habis dalam kurung waktu sehari atau dua hari, sehingga dalam sebulan biaya pengeluaran untuk rokok sekitar Rp. 450.000 – 600.000 per bulan. Masyarakat di Desa Sukamantri memiliki strategi jika pengeluaran rumah tangga lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan. Strategi yang digunakan yaitu dengan berhutang. Umumnya masyarakat di Desa Sukamantri melakukan hutang di warung atau toko yang pemiliknya masih memiliki

hubungan kekerabatan. Kondisi ini mengingat karakteristik tempat tinggal masyarakat di Desa Sukamantri yang berdekatan dengan saudara atau satu keturunan.

Selanjutnya, kondisi tempat tinggal masyarakat di Desa Sukamantri tergolong tinggi atau permanen. Sebesar 53,3% atau 16 responden memiliki kondisi tempat tinggal yang permanen. Ciri-ciri kondisi tempat tinggal yang permanen adalah jenis lantai keramik, dinding tembok, atap genteng, fasilitas MCK sendiri, sumber penerangan listrik PLN dengan daya terpasang lebih dari 2.200 watt, sumber air minum adalah air dalam kemasan, bahan bakar memasak menggunakan gas. Kondisi ini juga sesuai dengan penerima program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Sukamantri. Tahun 2016, Desa Sukamantri hanya menerima program bantuan RTLH sebanyak 10 rumah. Berikutnya di tahun 2017, Desa Sukamantri tidak mendapatkan program bantuan RTLH. Hal ini dikarenakan sistem program bantuan RTLH yang bergilir. Rencananya di tahun 2018, Desa Sukamantri akan mengajukan 20 rumah untuk menerima program bantuan RTLH. Variabel terakhir yaitu tingkat kepemilikan aset masyarakat di Desa Sukamantri tergolong sedang. Sebesar 80% atau setara dengan 24 responden mempunyai tingkat kepemilikan aset sedang. Kriteria kepemilikan aset pada golongan sedang yaitu memiliki 6-11 barang elektronik dan memiliki jenis kendaraan minimal satu sepeda/motor. Kepemilikan aset yang dijadikan indikator dalam tulisan ini yaitu barang elektronik dan jenis kendaraan yang dimiliki. Masyarakat di Desa Sukamantri cenderung lebih banyak memiliki barang elektronik daripada jenis kendaraan. Hasil data di lapangan menunjukkan bahwa sebesar 66,7% responden memiliki barang elektronik sebanyak lebih dari 11 barang elektronik (tinggi), sedangkan sebesar 20% responden memiliki barang elektronik sebanyak 6-11 (sedang). Sisanya 13,3% responden memiliki barang elektronik sebanyak 1-5 (rendah). Berbeda dengan kendaraan yang dimiliki oleh responden. Sebesar 60% responden memiliki minimal satu kendaraan sepeda/motor (sedang). Berikutnya sebesar 30% responden tidak memiliki kendaraan, dan sisanya sebesar 10% responden memiliki minimal satu kendaraan mobil. Penyebab barang elektronik lebih tinggi dimiliki oleh dibanding jenis kendaraan adalah pajak yang dibebankan bagi pemilik kendaraan. Pajak kendaraan tergantung dari jenis kendaraan yang dimiliki, tentunya pajak kendaraan antara motor dan mobil jauh berbeda. Masyarakat di Desa Sukamantri

rata-rata membayar pajak kendaraan motor sekitar Rp. 200.000 – Rp. 350.000 per tahun untuk satu kendaraan. Sementara itu, untuk pajak kendaraan mobil dikenakan biaya sekitar Rp. 1.000.000 – Rp. 2.500.000 per tahun.

Hubungan Pengorganisasian Inovator Pertanian dengan Kesejahteraan Masyarakat

Level pengorganisasian yang dilakukan oleh JH adalah level pengembangan komunitas lokal. Tulisan ini akan melihat hubungan antara level pengembangan komunitas lokal dalam pengorganisasian JH dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4 Hubungan level pengembangan komunitas lokal dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, Desa Sukamantri, 2017

	Level Pengembangan Komunitas Lokal	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
Spearman's rho	Level Pengembangan Komunitas Lokal	Correlation Coefficient
		Sig. (2-tailed)
		N
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Correlation Coefficient	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
		Sig. (2-tailed)
		N

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil uji hubungan menggunakan *rank spearman* menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0,383 berarti berada pada rentang koefisien korelasi 0,26 – 0,50. Koefisien korelasi ini menyatakan bahwa hubungan level pengembangan komunitas lokal dan tingkat kesejahteraan masyarakat tergolong sedang. Sedangkan tanda positif diartikan bahwa terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut yang searah. Artinya, ketika semakin tinggi level pengembangan komunitas lokal maka akan terjadi peningkatan pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu nilai probabilitas 0,037 lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara level pengembangan komunitas lokal dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan level pengorganisasian yang dilakukan seorang inovator pertanian dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Level pengorganisasian

yang dihubungkan adalah level pengembangan komunitas lokal. Hubungan antara kedua variabel tersebut berhubungan positif (searah), sehingga ketika level pengembangan komunitas lokal tinggi maka akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat Desa Sukamantri merasa bahwa pengorganisasian JH melalui kegiatan kader-kader pertanian dan pengelolaan bank sampah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manfaat kegiatan pemberdayaan JH dapat dirasakan secara langsung dan tidak langsung oleh masyarakat Desa Sukamantri. Salah satu contoh masyarakat yang memiliki mata pencaharian di bidang pertanian merasakan manfaatnya secara langsung dengan bertambahnya keterampilan cara bertani yang bisa meningkatkan hasil panen. Sementara itu, bagi masyarakat yang bekerja di bidang *non* pertanian juga bisa mendapatkan manfaat langsung dengan bergabung menjadi pekerja/karyawan di usaha Mutiara Keraton Jimmy&Co. Saat ini JH sudah memiliki puluhan karyawan untuk menjalankan usaha tersebut. Karyawan JH banyak yang berasal dari masyarakat di Desa Sukamantri itu sendiri. Unikny karyawan JH yang bergabung tersebut merupakan mantan preman yang ada di desa. JH menyadari bahwa dalam menjalankan usaha atau kegiatan pemberdayaan perlu melibatkan masyarakat. Meskipun masyarakat di Desa Sukamantri cenderung memiliki mata pencaharian di bidang *non* pertanian jika dibandingkan dengan di bidang pertanian. Sebanyak 24 responden pada penelitian ini bekerja di bidang *non* pertanian, sedangkan hanya 6 responden yang bekerja di bidang pertanian. Data profil Desa Sukamantri (2017) juga menyatakan bahwa hanya 589 jiwa yang bekerja di bidang pertanian, sedangkan sisanya sebanyak 12.252 masyarakat di Desa Sukamantri yang bekerja di bidang *non* pertanian seperti PNS, pedagang, pengrajin sepatu, dan karyawan swasta. Tentunya kondisi ini juga menjadi tantangan bagi JH dalam menjalankan usaha dan kegiatan pemberdayaan yang lebih banyak berfokus di bidang pertanian.

Tulisan ini juga melihat hubungan level pengorganisasian JH dengan masing-masing variabel tingkat kesejahteraan masyarakat untuk melihat hubungan mana yang paling kuat. Adapun hasil uji hubungan menggunakan *rank spearman* disajikan pada Tabel 5.

Hubungan yang paling kuat diantara variabel tingkat kesejahteraan masyarakat adalah level pengembangan komunitas lokal dengan tingkat pendapatan rumah tangga. Hasil uji hubungan menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi antara level pengembangan komunitas lokal dan tingkat pendapatan rumah tangga yaitu sebesar 0,516. Nilai koefisien korelasi tersebut berada pada rentang 0,51 – 0,75 yang menandakan bahwa hubungan kuat (tinggi). Nilai probabilitas sebesar 0,013 lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara level pengembangan komunitas lokal dengan tingkat pendapatan rumah tangga. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi level pengembangan komunitas lokal maka terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga.

Tabel 5 Hubungan level pengembangan komunitas lokal dengan tingkat pendapatan rumah tangga, tingkat pengeluaran rumah tangga, kondisi tempat tinggal, dan kepemilikan aset masyarakat di Desa Sukamantri, 2017

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Y)	Level Pengembangan Komunitas Lokal (X)		Keterangan
	Nilai koefisien	Nilai probabilitas	
Tingkat Pendapatan Rumah Tangga	0,516*	0,013	Signifikan
Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga	0,174	0,357	Tidak signifikan
Kondisi Tempat Tinggal	0,203*	0,043	Signifikan
Kepemilikan aset	0,062	0,745	Tidak Signifikan

Masyarakat di Desa Sukamantri juga merasakan ada peningkatan pendapatan terutama setelah mengikuti kegiatan pembentukan kader-kader pertanian. Masyarakat menjadi memiliki keterampilan bertani secara mandiri, meskipun untuk saat ini pekerjaan petani masih menjadi mata pencaharian yang minim dilakukan oleh masyarakat. Bagi masyarakat yang memang bekerja sebagai petani mendapatkan manfaat dalam mengikuti kegiatan kader pertanian. Hasil panen masyarakat menjadi meningkat dengan mengikuti teknik penanaman yang didemonstrasikan oleh JH dalam kegiatan tersebut, selain itu masyarakat yang bekerja sebagai petani juga sudah mencoba menggunakan pupuk dan obat-obatan pertanian yang merupakan produk teknologi Jimmy Hantu-150. Pupuk dan obat pertanian tersebut dapat membuat tanaman menghasilkan panen yang lebih banyak dibanding sebelumnya. Sementara itu, bagi masyarakat Desa Sukamantri yang mempunyai pekerjaan utama di bidang *non* pertanian juga mulai

memilih kegiatan pertanian sebagai pekerjaan sampingan serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (*subsisten*).

Tantangan lain pengorganisasian yang dilakukan JH melalui kegiatan pemberdayaan adalah masyarakat Desa Sukamantri cenderung tidak mau mencoba lagi apabila mengalami kegagalan. Secara logika, kesejahteraan masyarakat akan tercapai jika masyarakat itu sendiri yang berusaha sekalipun telah mengalami kegagalan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil identifikasi level pengorganisasian JH termasuk ke dalam level pengembangan komunitas lokal. Tujuan pengorganisasian JH adalah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan yaitu menciptakan kader-kader pertanian dan pengelolaan bank sampah. Sementara itu, untuk tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Sukamantri tergolong sedang. Berdasarkan kategori jenis mata pencaharian masyarakat, kesejahteraan yang tergolong rendah adalah buruh tani, sedangkan PNS cenderung memiliki kesejahteraan yang tinggi. Hasil dari pengujian statistik yang menggunakan uji korelasi *rank spearman* menyatakan bahwa terdapat hubungan antara level pengembangan komunitas lokal dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hubungan tersebut positif atau searah yang diartikan ketika level pengembangan komunitas lokal tinggi maka terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diantara variabel kesejahteraan masyarakat yang memiliki hubungan paling kuat dengan level pengembangan komunitas lokal adalah tingkat pendapatan rumah tangga.

Saran

Adapun saran yang merujuk pada kesimpulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengorganisasian yang dilakukan seorang inovator pertanian antara lain sebagai berikut:

1. Bagi JH, diharapkan adanya kekonsistenan dalam pelaksanaan pengorganisasian melalui kegiatan pemberdayaan yaitu menciptakan kader-kader pertanian dan pengelolaan bank sampah. Adanya sifat konsisten ini diharapkan dapat memberikan dampak keberlanjutan terhadap kegiatan

yang dilakukan. Selain itu, perluasan cakupan wilayah untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan juga diperlukan agar seluruh masyarakat di Desa Sukamantri dapat merasakan manfaatnya, dan keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian yang dilakukan.

2. Bagi pemerintah desa, diharapkan dapat memberikan dukungan dengan cara menyediakan lahan – lahan pertanian untuk dimanfaatkan oleh petani yang mayoritas belum memiliki lahan, dan sebagai wadah untuk memperkenalkan teknologi baru bagi inovator pertanian seperti JH. Pemerintah desa juga dapat mencetak lebih banyak inovator pertanian seperti JH dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan di bidang pertanian.
3. Bagi akademisi, selanjutnya yang mempunyai ketertarikan dengan pengorganisasian inovator pertanian dan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat meneliti tentang keberlanjutan kegiatan pemberdayaan JH. Tidak semua desa memiliki inovator pertanian sekaligus pekerja sosial seperti JH yang telah melakukan pengorganisasian dengan memaksimalkan kapasitas masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.
4. Bagi masyarakat, diharapkan dapat lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan pengorganisasian yang dilakukan oleh JH melalui kegiatan pemberdayaan. Masyarakat juga diharapkan memiliki penilaian positif terhadap orang lain yang bukan merupakan masyarakat asli (orang pendatang). Selain itu, sifat untuk mencoba lagi setelah mengalami kegagalan menjadi syarat penting, karena kesejahteraan masyarakat akan tercapai jika dilakukan dengan usaha yang terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- [Permendagri] Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
- [Permendagri] Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

- [UU] Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Andini N. 2013. Pengorganisasian Komunitas dalam Pengembangan Agrowisata di Desa Wisata (studi kasus: Desa Wisata Kembangarum, Kabupaten Sleman). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 24(3). [Internet]. [2017 Februari 21]. Tersedia pada: <http://www.sappk.itb.ac.id/jpwk/wp-content/uploads/2014/02/Jurnal-2-Nurulitha.pdf>
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2015. Indikator Kesejahteraan Rakyat. BPS. Jakarta.
- Bezboruah C. 2013. Community Organizing for Health Care: An Anlysis of The Process. *Journal of Community Practice*, Vol. 21. [Internet]. [2017 Februari 28]. Tersedia pada: <http://www.thecyberhood.net/documents/papers/bez13.pdf>
- Kolopaking LM, Apriande C, Syaharbian R. 2016. Mekanisme Perencanaan Desa Membangun dan Membangun Desa. *Jurnal Pusat Studi Pembangunan Pertanian Pedesaan*, Vol. 1(1). [Internet]. [2017 Mei 9]. Tersedia pada: <http://psp3.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2016/05/WPMekanisme-Perencanaan-Desa-Membangun-dan-Membangun-Desa.pdf>
- Miles M, Huberman M. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. UI Press. Jakarta.
- Mukhotib MD. 2012. Membangun Organisasi Rakyat. Pustaka Obor. Jakarta.
- Nasdian F. 2014. Pengembangan Masyarakat. Yayasan Pustaka Obor. Jakarta.
- Rogers EM. 1983. Diffusion of Innovation. The Free Press. London.
- Rothman J, Tropman EJ. 1987. Models of Community Organization and Macro Perspectives: Their Mixing and Phasing. Peacock Publishers. US.
- Singarimbun M, Effendi S. 1989. Metode Penelitian Survei. LP3ES. Jakarta.
- Suhardin Y. 2007. Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25(3). [Internet]. [2017 Oktober 14]. Tersedia pada: <http://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/viewFile/1126/1093>

